

Pengaruh Pembelajaran PPKn Terhadap Pembentukan Sikap Demokratis Untuk Meningkatkan Civic Disposition Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Pangkatan

Wilda Putriansyah Hasibuan¹ Deny Setiawan²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}
Email: wildaputri285@gmail.com¹ denysetiawan1978@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran PPKn terhadap pembentukan sikap demokratis untuk meningkatkan civic disposition siswa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah populasi sebanyak 183 siswa, dengan sampel yang diambil menggunakan teknik proposional random sampling sebesar 20% berjumlah 37 siswa. Lokasi penelitian di SMK Negeri 1 Pangkatan tepatnya di Jalan Pendidikan Nomor.35, Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21462. Populasi dan sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Negeri 1 Pangkatan. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan rumus uji normalitas, uji linearitas, uji regresi linear sederhana dan uji hipotesis diolah dengan aplikasi SPSS. Hasil yang didapat menunjukkan peran pembelajaran PPKn mempunyai peran sebesar 65% dalam membentuk sikap demokratis siswa dengan nilai signifikansi sebesar $0.358 > 0.05$ besar pengaruhnya yaitu 2.4%. Besarnya peran pembelajaran PPKn dalam meningkatkan civic disposition sebesar 54% dengan nilai signifikansi $0.358 > 0.05$ besar pengaruhnya 2.0%. Maka terdapat peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis untuk meningkatkan civic disposition (Individual Responsibility, Self Discipline, Generosity, Toleration of Diversity) siswa di SMK Negeri 1 Pangkatan.

Kata Kunci: Pengaruh Pembelajaran, PPKn, Sikap Demokratis, Civic Disposition



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menjunjung tinggi sikap demokratis sangat penting dalam kehidupan sosial di Indonesia, mengingat negara ini memiliki keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, dan kelompok sosial. Keragaman ini merupakan hal yang tak terhindarkan, karena setiap individu dan kelompok pasti memiliki perbedaan. Tantangan ini bisa diatasi dengan baik jika perbedaan dan keberagaman tersebut diintegrasikan secara harmonis, sehingga menjadi kekuatan yang mendukung terciptanya masyarakat yang lebih maju, makmur, dan sejahtera, dengan dasar keadilan dan peradaban (Zamroni, 2013:97). Karena sistem demokrasi Indonesia masih jauh dari kata sempurna, diperlukan masyarakat yang mampu mengubah Indonesia menjadi bangsa yang demokrasinya sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Harus ada proses atau upaya pendidikan demokratis yang signifikan untuk mewujudkan cita-cita demokrasi tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pendidikan demokratis dipertahankan melalui lembaga pendidikan dan masyarakat, karena "demokrasi bukanlah mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya" (Branson, 1998).

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan pelajaran penting di sekolah yang membantu mengembangkan kepribadian dan nilai-nilai demokrasi siswa. Siswa harus dapat mengembangkan pandangan demokratis dalam interaksi sosial, pembelajaran di kelas, keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan organisasi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang mengajarkan warga negara bagaimana menjadi warga negara demokratis yang baik, yang merupakan sesuatu yang dibutuhkan negara

Indonesia. Tujuan dari pelajaran ini adalah agar seluruh warga negara Indonesia menjadi good and smart citizen. Untuk mencapai ini, warga negara yang baik dan cerdas harus memiliki sikap demokratis yang kuat dan mengembangkan karakter kewarganegaraan (civic disposition). Nilai-nilai demokratis dan civic disposition sangat berkaitan erat. Kenyataannya, banyak generasi muda terutama para siswa yang kurang memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Penerapan nilai-nilai demokrasi sangatlah penting dalam membangun dan membentuk kehidupan demokrasi. Generasi muda menyaksikan hilangnya norma-norma demokrasi, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Hal ini terbukti dalam sejumlah insiden dan tindakan yang sering dilaporkan di media. Pertengkaran mahasiswa, demokrasi anarkis, dan sikap otokratis para pemimpin. Nilai-nilai luhur dan norma bangsa semakin memudar dan sedikit digunakan oleh generasi muda. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi hilangnya nilai dan norma tersebut adalah munculnya modernisme dan ideologi kapitalisme. Benar bahwa globalisasi telah membawa kita pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di luar itu, negara kita sedang mengalami krisis kepribadian dan spiritual yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan data dari SMK Negeri 1 Pangkajene, bahwa kasus remaja atau pelajar tahun 2023 melakukan kasus seperti tawuran pelajar, bullying, cabut dan lain-lain mengalami naik turun setiap bulannya, tercatat sebanyak 155 kasus sepanjang bulan Januari sampai Mei 2023. Sebanyak 28 kasus pada Januari, 26 kasus pada Februari, 31 kasus pada Maret, 37 kasus pada April, dan 33 kasus pada Mei 2023. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa ada fluktuasi keadaan siswa dari bulan ke bulan. Maka dari itu pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan generasi berikutnya untuk bertindak secara demokratis, menahan diri dari perilaku anarkis, dan meneruskan warisan bangsa mereka dengan kecerdasan dan kejujuran moral. Seperti yang dijelaskan oleh argumen di atas, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sangat penting untuk membantu siswa menumbuhkan sikap demokratis yang akan memungkinkan mereka untuk menjadi warga negara yang lebih baik dan berpartisipasi dengan sukses dalam masyarakat demokratis.

Dari hasil observasi sebelumnya pada tanggal 17 Maret 2023 di SMK Negeri 1 Pangkajene masih banyak siswa yang tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi di sekolah. Salah satu masalah yang diidentifikasi adalah kurangnya kepercayaan diri siswa dalam kemampuan mereka untuk menyuarakan ide-ide mereka selama proses pembelajaran. Kurangnya kepercayaan diri siswa dalam mengekspresikan pikiran mereka adalah hasil dari sentimen malu dan takut menjadi salah. Kurangnya minat siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah juga telah diidentifikasi sebagai kekhawatiran. Alasan untuk ini adalah bahwa jumlah waktu yang dihabiskan di sekolah yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang menjadi apatis dan takut akan situasi sosial. Masalah ketidaktahuan siswa tentang tanggung jawab dan hak-hak mereka sebagai warga negara yang demokratis juga ada, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa beberapa siswa memilih untuk tidak menggunakan hak mereka untuk memilih dalam pemilihan ketua OSIS. Selain itu, peran mata pelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis siswa yang belum maksimal.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sangat penting dalam membantu siswa dalam mengembangkan sikap kewarganegaraan, perspektif demokratis, dan keterampilan kewarganegaraan mereka, menjadi warga negara yang layak yang mampu berpartisipasi dalam masyarakat, kegiatan di kelas, kelompok, sekolah, dan bahkan di kalangan siswa sendiri. Di SMK Negeri 1 Pangkajene, sejumlah besar siswa masih belum memiliki pola pikir demokratis, yang berkontribusi pada rendahnya civic disposition mereka. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi sejumlah elemen yang berkontribusi terhadap hal ini, termasuk kurangnya kepercayaan diri siswa dalam menyuarakan pemikiran

mereka selama pembelajaran PPKn dan kurangnya tanggung jawab mereka saat mengikuti instruksi atau menyelesaikan tugas dari guru, kurangnya tanggung jawab juga terlihat pada ketua kelas yang tidak optimal dalam mengatur kondisi kelas, kurang memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara demokratis, serta pembelajaran PPKn yang belum efektif dalam membentuk sikap demokratis siswa untuk meningkatkan civic disposition mereka. Karena itu, peneliti tertarik untuk menyelidiki topik ini dalam penelitian berjudul "Pengaruh Pembelajaran PPKn Terhadap Pembentukan Sikap Demokratis untuk Meningkatkan Civic Disposition Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Pangkatan."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendefinisikan dan menjelaskan secara statistik bagaimana ide-ide saling berinteraksi di berbagai faktor. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan pengaruh pembelajaran PPKn terhadap sikap demokratis untuk meningkatkan civic disposition siswa. Data dikumpulkan melalui angket yang diberikan kepada responden. Analisis data mencakup uji normalitas, uji linearitas, uji t, dan uji hipotesis. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pangkatan, Jalan Pendidikan Nomor 35, Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21462. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah proporsional random sampling, yaitu metode di mana sampel diambil dengan cara memilih setiap unit sampel berdasarkan proporsi dari kelompok dalam populasi yang dipilih secara acak. Dalam hal ini, sampel diambil sebesar 20% dari total populasi siswa kelas XI SMK Negeri 1 Pangkatan yang berjumlah lebih dari 100, yaitu sebanyak 183 siswa, sehingga diperoleh 37 responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap melalui pengalaman belajar. Pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui pengajaran formal di sekolah, kursus, atau pelatihan, atau melalui pengalaman sehari-hari dalam kehidupan. Tujuan dari pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan individu dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitarnya. Menurut Sanjaya (dalam Ambarsari, 2013), pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah proses kolaboratif antara guru dan siswa yang bertujuan untuk memanfaatkan berbagai potensi dan sumber belajar, baik yang berasal dari dalam diri siswa maupun dari luar, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pandangan ini didukung oleh Holt (dalam Murdiono, 2012) yang menyatakan bahwa efektivitas proses pembelajaran dapat ditingkatkan apabila siswa melakukan beberapa kegiatan berikut:

1. Mengungkapkan kembali informasi dengan kata-kata mereka sendiri.
2. Memberikan contoh untuk memperjelas informasi.
3. Mengenali informasi dalam berbagai bentuk dan situasi.
4. Menjalinkan hubungan antara informasi dengan fakta atau gagasan lainnya.
5. Menerapkan informasi dalam berbagai cara.
6. Memprediksi konsekuensi dari informasi yang dipelajari.
7. Mengidentifikasi lawan atau kebalikan dari informasi yang ada.

Dengan demikian, pembelajaran dipahami sebagai proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan aspek-aspek dalam diri peserta didik, guna mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Menurut Branson (1998), pendidikan kewarganegaraan harus mencakup tiga komponen utama: pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan watak

kewarganegaraan (civic disposition). Pengetahuan kewarganegaraan merujuk pada informasi dan prinsip-prinsip yang perlu diketahui setiap warga negara. Keterampilan kewarganegaraan mencakup kemampuan intelektual dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan watak kewarganegaraan adalah komponen yang paling penting dan esensial dalam Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan dianggap sebagai hasil dari pengembangan dua komponen sebelumnya. Dalam hal ini, visi, misi, dan tujuan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menekankan penguatan dimensi afektif seperti karakter, sikap, dan potensi lainnya. Djahiri dalam (Saputra, 2017:21) menyatakan bahwa Sikap demokratis individu dapat diamati dalam keramahan, toleransi, kemampuan untuk bersikap kritis dan kreatif, kepekaan terhadap lingkungannya, kemampuan untuk melihat solusi terbaik untuk masalah yang muncul dari diri mereka sendiri dan lingkungannya, kemampuan untuk menghormati pendapat orang lain bahkan ketika pendapat itu berbeda dari pendapatnya sendiri, kemampuan untuk mengekspresikan pendapat tersebut dengan cara yang jelas dan terorganisir, dan keinginan untuk maju. Quigley (dalam Winataputra, 2012:58) mendefinisikan civic disposition sebagai "sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang mendukung perkembangan fungsi sosial yang sehat serta kepentingan umum dalam sistem demokrasi." Quigley (1991:13) menjelaskan bahwa civic disposition mencakup beberapa karakteristik kepribadian, antara lain:

1. Civility (Keadaban): Hormat terhadap orang lain dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat.
2. Individual responsibility :Kewajiban pribadi dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Self discipline: Kemampuan untuk mengatur diri sendiri.
4. Civic mindednes: Kesadaran akan isu-isu kewarganegaraan.
5. Open mindednes: Keterbukaan terhadap ideide baru dan pemikiran kritis.
6. Compromise: Kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan mencari solusi bersama.
7. Toleration of diversity: Menghargai perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat.
8. Patience and persistence : Kesiediaan untuk terus berusaha dan bersabar.
9. Compassion: Rasa peduli terhadap orang lain.
10. Generosity: Kemurahan hati dalam berbagi dengan orang lain.
11. Loyalty to the nation and its principles: Dedikasi terhadap negara dan nilai-nilai dasarnya.

Dengan demikian, civic disposition dapat dipahami sebagai serangkaian karakteristik yang mencerminkan kepribadian seorang warga negara yang cerdas dan berkarakter, serta berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik dan demokratis.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn berperan cukup optimal dalam membentuk sikap demokratis pada siswa di SMK Negeri 1 Pangkajene, dengan kontribusi sebesar 68%. Namun, nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0.358 > 0.05$, menunjukkan bahwa pengaruh pembelajaran PPKn terhadap sikap demokratis adalah 2.4%, yang berarti tidak ada hubungan signifikan antara Pendidikan PPKn (X) dan Sikap Demokratis (Y1). Sementara itu, 97.6% dari pengaruhnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadi, latar belakang, dan lingkungan sekitar (Ilm dkk., 2022). Latar belakang keluarga dan pengalaman pribadi siswa berbeda-beda, sehingga nilai-nilai demokrasi harus ditanamkan sejak dini dalam proses pembelajaran di sekolah (Susanti dkk., 2023). Untuk meningkatkan sikap demokratis, proses pembelajaran PPKn perlu mengadopsi metode, pendekatan, dan strategi yang lebih inovatif agar siswa dapat memahami dan menerapkan materi dengan lebih efektif. Selain itu, pembelajaran sebaiknya diperkuat dengan contoh perilaku yang

mencerminkan sikap demokratis, seperti pengalaman berorasi dalam pemilihan ketua OSIS, keterlibatan dalam berbagai organisasi, dan interaksi aktif di masyarakat. Pembelajaran PPKn memiliki peran yang penting dalam membentuk civic disposition, hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pembelajaran PPKn dalam meningkatkan civic disposition siswa di SMK Negeri 1 Pangkajene adalah sebesar 54%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran PPKn yang baik, salah satu tujuan utama dari PPKn—yaitu meningkatkan civic disposition siswa—dapat dicapai. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai signifikansi yang didapatkan yaitu sebesar $0.358 > 0.05$ yang tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Pendidikan PPKn (X) terhadap Civic Disposition (Y2) sedangkan sisanya sebesar 98.0 % (100 - 2.0) lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Kewarganegaraan, yang berasal dari konsep Latin "civicus" berarti "warga negara," merupakan dasar dari pendidikan kewarganegaraan (Pangalila, 2017). Pendidikan ini bertujuan mengajarkan pemikiran kritis dan tindakan demokratis, dengan menanamkan kesadaran bahwa demokrasi adalah cara terbaik untuk memenuhi kewajiban masyarakat. Namun, proses pembelajaran yang kurang efektif, terutama dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), menjadi masalah saat ini (zalmi & Montessori, 2022). Hal ini terlihat dari dominasi sistem konvensional yang membuat pembelajaran PPKn masih kurang maju, sehingga siswa sulit mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan, serta tidak dapat menyelesaikan masalah kewarganegaraan melalui pendidikan (Adi prasetyo, Hambali, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis serta meningkatkan civic disposition siswa di SMK Negeri 1 Pangkajene, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Nilai signifikansi yang didapatkan untuk pengaruh pendidikan PPKn terhadap sikap demokrasi yaitu sebesar $0.358 > 0.05$ yang terdapat adanya pengaruh (tidak signifikan) antara Pendidikan PPKn (X) terhadap Sikap Demokratis (Y1). 2. nilai signifikansi yang didapatkan pengaruh pendidikan PPKn terhadap civic disposition yaitu sebesar $0.358 > 0.05$ yang terdapat adanya pengaruh (tidak signifikan) antara Pendidikan PPKn (X) terhadap Civic Disposition (Y2).

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, Meta. 2013. Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Fungsi Media Massa Kebangsaan. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol 1.No 9.
- Branson, S, Margaret. 1998. *The Role of Civic Education*. Position Paper by The Communitarian Network.
- Edi Prasetyo, Hambali, G. (2021). Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Civic Disposition (Watak Kewarganegaraan) Siswa Di SMA Negeri 1 Dayun Kecamatan Dayun. *Jurnal PKn*, 1(1), 1-13.
- Ilm, M. I., Kiswara, G. J., & Mustika, S. (2022). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila Terhadap Perilaku Demokrasi Peserta Didik Kelas IX MTS Swasta YPKS PADANGSIDIMPUAN. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483-1490.
- Murdiono, Mukhamad. 2012. *Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak.
- Pangalila, T. (2017). Peningkatan Civic Disposition Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 91-103.
- Quigley, N. Charles & Charles F. Bahmueller. 1991. *CIVITAS: A Framework for Civic Education*. Calabasas, CA: Center for Civic Education
- Saputra, Trio. 2017. *Peranan Forum Pendidikan dan Kewarganegaraan Dalam Menanamkan*

Sikap Demokratis Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol 5. No 6.

Susanti, A., Darmansyah, A., & Harianto, K. (2023). Pembinaan Sikap Demokratis Siswa Melalui Pembelajaran Ppkn Di Sdn 17 Rejang Lebong. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn*, 10(2), 207–215. <https://doi.org/10.36706/jbti.v10i2.21687>

Winataputra, Udin Saripudin. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Bandung: Widya AksaraPress

Zalmi, P. O., & Montessori, M. (2022). Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Budaya Sekolah dalam Mengembangkan Nilai Civic Disposition Siswa di SMPN Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 10(1), 9–22.

Zamroni.2013. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Ombak